



# **PANDUAN HOLISTIK** Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas

**RAHMATUL FURQAN**  
Universitas Hasanuddin

**NURLAELA JUFRI**  
Digital Access Programme,  
British Embassy Jakarta

**DINA AFRIANTY**  
La Trobe University

**NUR FIRDAUS**  
Badan Riset dan Inovasi Nasional

**SHABRINA SYNTHA DEWI**  
Universitas Negeri Makassar



Panduan Holistik  
INKLUSI KEUANGAN BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS

**Penerbit**



# PANDUAN HOLISTIK INKLUSI KEUANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

## **Penulis**

Rahmatul Furqan

Nurlaela Jufri

Dina Afrianty

Nur Firdaus

Shabrina Syntha Dewi

**ISBN** 978-979-530-399-2

**e-ISBN** 978-979-530-400-5

**Cetakan I** 2022

## **Penerbit**

Unhas Press

## **Keanggotaan**

IKAPI Nomor: 002/SSL/01 dan APPTI Nomor: 005.026.1.03.2018

## **Alamat Penerbit**

Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea

Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan

HP/WA: +62 8229 9555 591 — Email: unhaspress@gmail.com

Laman: unhaspress.unhas.ac.id

**Hak Cipta** ©Rahmatul Furqan, dkk. *All rights reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang.

*Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.*

# KATA PENGANTAR

**D**iskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas merupakan isu nyata yang masih terjadi pada berbagai sektor. Hal tersebut berujung pada kesejahteraan yang timpang dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Upaya untuk melawannya harus dilakukan secara menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan inklusif.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional dan daerah merupakan isu yang sangat penting dan strategis.

Pemerintah sendiri, dari level nasional hingga daerah telah berupaya memenuhi serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Upaya itu terwujud dalam berbagai bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta sejumlah program strategis. Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Gorontalo juga memiliki komitmen kuat untuk menjadi daerah yang ramah disabilitas. Terutama menyadari bahwa jumlah penyandang disabilitas di Gorontalo yang cukup tinggi dan rata-rata berada di usia produktif.

Untuk itu, pemerintah berusaha selalu hadir demi mengayomi dan mengakomodir berbagai kebutuhan penyandang disabilitas agar

dapat menggali potensinya serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bersama Yayasan Dharma Bhakti Ummu Syahidah, Provinsi Gorontalo telah mengadakan sejumlah pelatihan untuk mendorong produktifitas dan kemandirian sahabat-sahabat disabilitas, termasuk diantaranya pelatihan keterampilan menjahit dan kewirausahaan. Berbagai pelatihan tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan terbukanya akses keuangan yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk mendorong kehidupan mereka yang lebih mandiri dan sejahtera.

Adanya buku ini saya yakini akan membantu untuk terwujudnya inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. Buku ini melakukan pendekatan yang tepat dengan menyajikan panduan holistik untuk mendorong keterlibatan semua elemen guna memastikan penyandang disabilitas bisa terfasilitasi dan terlayani pada persoalan sistem keuangan, baik di perbankan maupun non perbankan.

Sebagaimana termuat dalam buku panduan ini, pemerintah juga mitra terkait harus terus melakukan terobosan, inovasi, dan perbaikan guna meningkatkan pelayanan akses keuangan yang inklusif. Secara bersamaan, sahabat disabilitas juga harus terus dibekali dengan literasi keuangan yang baik agar tidak saja memiliki kemampuan untuk akses keuangan tetapi juga dapat mengelola potensi finansial mereka dengan baik, serta terhindar dari segala bentuk penipuan.

**Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H**  
Pembina Yayasan Dharma Bhakti Ummu Syahidah  
Anggota DPR-RI periode 2019–2024

# PRAKATA

Penyandang disabilitas dianggap lima kali lebih beresiko mengalami kemiskinan dari pada masyarakat lain pada umumnya dan konsep keuangan inklusi diyakini dapat menjadi salah satu jalan utama menuju pembangunan inklusif di mana penyandang disabilitas tidak lagi tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Di tingkatan global, sejumlah negara telah merumuskan panduan khusus terkait konsep keuangan inklusif melalui G20 Toronto Summit Tahun 2010. Sementara, pada level nasional, Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung inklusi keuangan. Luarannya berupa Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Penyandang disabilitas pun menjadi salah satu target utama dari SNKI ini.

Sebagai bentuk dukungan guna mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia, proyek bertajuk *“Unlock Access to Financial Institution for People with Disabilities in Indonesia”* pun digagas pada Tahun 2020. Proyek ini diinisiasi oleh dua alumni The University of Melbourne, Australia yakni, Nurlaela Jufri dan Rahmatul Furqan, bekerja sama dengan Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), serta LKS Ummu Syahidah di Gorontalo selaku mitra lokal. Berjalannya kegiatan pada proyek ini pun mendapat dukungan pendanaan dari skema hibah alumni Australia atau *Alumni Grant Scheme (AGS)*. Inisiasi awal kegiatan ini berdasarkan pada

kenyataan bahwa 26 juta orang Indonesia hidup dengan disabilitas, dan dipilihnya Provinsi Gorontalo sebagai lokasi *pilot project* dikarenakan lebih dari 27,9 persen populasi disabilitas di Indonesia, berada di Provinsi Gorontalo, merujuk pada data terakhir dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (Badan Pusat Statistik) tahun 2019.

Buku panduan holistik untuk mewujudkan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas ini pun lahir sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan proyek yang dimaksud. Sebagai landasan penyusunan buku ini, tim telah terlebih dahulu melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan jumlah peserta 30 orang. FGD melibatkan kelompok penyandang disabilitas yang mewakili berbagai jenis disabilitas berbeda untuk memastikan keragaman pendapat yang memadai.

Secara khusus, FGD bertujuan menggali pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan, pengetahuan tentang produk keuangan, dan sejauh mana sistem keuangan saat ini telah memberdayakan mereka untuk keluar dari kemiskinan. FGD terpisah dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan publik-swasta untuk membangun sistem keuangan yang inklusif dan efektif dan diskusi melibatkan staf dari beberapa lembaga keuangan di Provinsi Gorontalo sebagai lokasi pilot proyek, seperti bank konvensional, koperasi simpan pinjam, PT Pegadaian, Bank Sulut Go dan Bank Rakyat Indonesia, bank sentral, pemerintah daerah, serta entitas terkait lainnya seperti, perguruan tinggi, dan media.

Buah dari FGD tersebut kemudian menghasilkan berbagai catatan penting, perihal berbagai tantangan yang masih menghambat terwujudnya keuangan inklusif di Provinsi Gorontalo secara khusus, dan di wilayah Indonesia lainnya secara umum. Tim kemudian merumuskan berbagai solusi pemecahan atas sejumlah hambatan tadi yang secara aplikatif tertuang pada buku pedoman ini. Secara umum, buku panduan melihat Inklusi keuangan sebagai sebuah proses multi-dimensi yang menuntut partisipasi penuh dan aktif

semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Untuk itu, strategi harus direncanakan secara spesifik dan komprehensif. Mulai dari penguatan literasi keuangan pada penyandang disabilitas, penguatan pemahaman konsep inklusi pada Lembaga terkait yakni pemerintah dan lembaga keuangan, baik perbankan dan non-perbankan. Tak kalah pentingnya juga dukungan dari media arus utama dan publik sendiri, serta pemanfaatan teknologi digital.

Pada akhirnya, buku panduan ini mendorong adanya penguatan komitmen dan kolaborasi yang solid antara pemangku kepentingan sektor publik dan swasta nasional untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SNKI secara efektif dan holistik atau menyeluruh. Harapannya, berbagai materi yang disusun dalam buku ini dapat menjadi rujukan dan berkontribusi secara langsung pada upaya percepatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Salam Inklusi,  
**Tim Penyusun**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>1. DESKRIPSI SINGKAT MENGENAI BUKU PANDUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Tujuan	2
1.2. Target	2
1.3. Bagaimana Buku Panduan ini Dikembangkan	2
<b>2. DISABILITAS DAN LITERASI KEUANGAN</b>	<b>3</b>
2.1. Apa yang Dimaksud dengan Disabilitas?	4
2.2. Apa Saja Ragam Disabilitas?	4
2.3. Disabilitas dan Kesetaraan	5
2.4. Apa yang Dimaksud dengan Keuangan Inklusif	5
2.5. Apa yang Dimaksud dengan Literasi Keuangan?	7
<b>3. DISABILITAS DAN AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN</b>	<b>9</b>
3.1. Gambaran Umum Aksesibilitas Terhadap Layanan Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas	10
3.2. Regulasi Terkait Hak untuk Mendapatkan Layanan Keuangan yang Setara bagi Penyandang Disabilitas	14
<b>4. DISABILITAS DAN STANDAR LAYANAN INKLUSIF</b>	<b>17</b>
4.1. Standar Layanan Keuangan Inklusif	18
4.2. Mewujudkan Keuangan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	19
4.3. Standar Fasilitas Perbankan yang Inklusif	20

4.4.	Apa Saja Peran Lembaga Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas?	22
4.5.	Apakah Perlu Lembaga Keuangan Memberikan Edukasi Keuangan Kepada Penyandang Disabilitas?	22
4.6.	Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas	22
4.7.	Bagaimana Lembaga Keuangan Menjangkau Penyandang Disabilitas	24
<b>5.</b>	<b>LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN INKLUSI KEUANGAN</b>	<b>25</b>
5.1.	Apa yang Dimaksud dengan Keuangan Mikro?	26
5.2.	Apakah Keuangan Mikro dapat Menjadi Jembatan untuk Menjangkau Penyandang Disabilitas?	26
5.3.	Model Keuangan Mikro yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	27
<b>6.</b>	<b>SDM LEMBAGA KEUANGAN YANG INKLUSIF</b>	<b>31</b>
6.1.	Pendamping Bagi Pengandang Disabilitas	32
6.2.	Penerjemah: Siapa?	32
6.3.	Ahli Bagi Penyandang Disabilitas	32
6.4.	Etika Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas	33
6.5.	Keterampilan yang Dibutuhkan untuk Melayani Penyandang Disabilitas	34
6.6.	Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan yang Berperspektif Disabilitas	37
<b>7.</b>	<b>AKSES KEUANGAN DIGITAL</b>	<b>39</b>
7.1.	Digital Keuangan	40
7.2.	Akses Keuangan Digital untuk Penyandang Disabilitas	42
7.3.	Hambatan Akses Keuangan Digital	43
<b>8.</b>	<b>STRATEGI KOMUNIKASI YANG INKLUSIF</b>	<b>51</b>
8.1.	Komunikasi Inklusif	52
8.2.	Melawan <i>Stereotypes</i> Penyandang Disabilitas	53
8.3.	Menciptakan Konten yang Inklusif	55
8.4.	Publikasi pada Beragam Channel/Media	56
8.5.	Konten yang Aksesibel	58

<b>LITERASI KEUANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>	<b>61</b>
<b>9. DASAR-DASAR LITERASI KEUANGAN</b>	<b>63</b>
9.1. Siapa yang Harus Membaca Panduan Ini?	64
9.2. Definisi Literasi Keuangan	64
9.3. Tingkat Literasi Keuangan	64
9.4. Tolak Ukur Tingkat Literasi Keuangan	66
9.5. Manfaat Literasi Keuangan	67
9.6. Mengapa Literasi Finansial Itu Penting?	68
<b>10. PERENCANAAN KEUANGAN</b>	<b>71</b>
10.1. Perencanaan Keuangan	72
10.2. Aspek Perencanaan Keuangan	73
10.3. Perencanaan Arus Kas	74
10.4. Pendapatan	75
10.5. Pengeluaran	75
10.6. Budgeting	75
10.7. Utang	76
10.8. Tabungan	77
10.9. Dana Darurat	78
10.10. Perencanaan Asuransi	78
10.11. Perencanaan Pensiun	79
10.12. Perencanaan Investasi	80
<b>11. FINTECH</b>	<b>83</b>
11.1. Apa Itu Fintech?	84
11.2. Perkembangan Fintech di Indonesia	84
11.3. Dasar Hukum Fintech di Indonesia	85
11.4. Manfaat Fintech di Indonesia	85
11.5. Jenis-jenis Fintech di Indonesia	87
11.6. Fintech Legal vs. Ilegal	89
<b>12. ELECTRONIC BANKING</b>	<b>93</b>
12.1. Apa Itu e-Banking	94
12.2. SMS Banking	94
12.3. Mobile Banking	95
12.4. Internet Banking	96

<b>13. HINDARI POTENSI PENIPUAN</b>	<b>99</b>
13.1. Phising	100
13.2. Impersonation	100
13.3. Vishing	101
13.4. Smishing	101
13.5. Cara Menghindari Modus Penipuan	101
<b>14. FITUR AKSESIBILITAS UNTUK PERANGKAT DIGITAL</b>	<b>103</b>
14.1. Apa itu Fitur Aksesibilitas	104
14.2. Menggunakan Pembaca Layar dengan TalkBack	105
14.3. Mengubah Tampilan	105
14.4. Kontrol Interaksi	106
14.5. Menggunakan Penampil Braille	106
<b>PENUTUP</b>	<b>109</b>
<b>REFERENSI</b>	<b>111</b>
<b>TIM PENYUSUN</b>	<b>115</b>

Penyandang disabilitas dianggap lima kali lebih berisiko mengalami kemiskinan dari pada masyarakat lain pada umumnya. Konsep inklusi keuangan diyakini dapat menjadi salah satu jalan utama menuju pembangunan inklusif di mana penyandang disabilitas tidak lagi tertinggal dalam pembangunan ekonomi.

Secara umum, buku panduan ini melihat inklusi keuangan sebagai sebuah proses multi-dimensi yang menuntut partisipasi penuh dan aktif semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Untuk itu, strategi harus direncanakan secara spesifik dan komprehensif. Mulai dari penguatan pemahaman konsep inklusi pada lembaga terkait yakni pemerintah dan lembaga keuangan, baik perbankan dan non-perbankan. Tak kalah pentingnya juga, dukungan dari media arus utama dan publik sendiri, serta pemanfaatan teknologi digital.

Pada akhirnya, buku panduan ini mendorong adanya penguatan komitmen dan kolaborasi yang solid antara pemangku kepentingan sektor publik dan swasta, mulai dari tingkat nasional hingga regional untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) secara efektif dan holistik atau menyeluruh. Harapannya, berbagai materi yang disusun dalam buku ini dapat menjadi rujukan dan berkontribusi secara langsung pada upaya percepatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas.



Gedung UPT Unhas Press  
Kampus Unhas Tamalanrea  
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Email: unhaspress@gmail.com  
Makassar

